

3.

ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

Rilus A. Kinseng⁶

Abstrak

Ketahanan pangan sangat penting, baik dari segi biologis maupun sosial. selanjutnya, pangan dan ketahanan pangan merupakan sebuah konstruksi sosial. Indonesia memiliki potensi sosial budaya lokal yang mendukung ketahanan pangan, baik dari segi variasi, penyediaan, maupun pengelolaan bahan pangan, serta sistem pengelolaan sumberdaya alam untuk pangan. Namun *local wisdom* ini semakin pudar karena mengalami "gempuran" dari konstruksi sosial yang berasal dari luar, termasuk kebijakan pemerintah seperti "berbasisasi". Oleh sebab itu, maka ada beberapa konstruksi sosial tentang pangan yang perlu di-dekonstruksi, dan kemudian di-rekonstruksi, sementara beberapa konstruksi sosial lokal perlu diperkuat dan dikembangkan agar tercipta ketahanan pangan yang lebih kokoh.

Kata kunci: *Pangan, Ketahanan Pangan, Konstruksi Sosial, Local Wisdom.*

⁶ Dr. Rilus A. Kinseng adalah dosen pada Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

A. Pendahuluan

Pertama-tama sekedar me-*refresh* ingatan kita, masalah ketahanan pangan atau sebaliknya krisis pangan, bukanlah merupakan suatu fenomena yang baru. Pada tahun 1975 saja Mitchell sudah mengatakan bahwa "*The world food crisis is not a creature of recent discovery its...essential characteristics have been with us throughout the current century*" (dikutip oleh Bakker, 1990). Dalam buku yang berjudul "*The World Food Crisis: Food Security in Comparative Perspective*" yang diterbitkan pada tahun 1990 itu, sebagai editor buku tersebut Bakker mengatakan: "*The basic thesis of this book – taken as a whole – is that: there is a world food crisis*" (Bakker, 1990:8).

Sayangnya, sekalipun Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang kaya akan sumberdaya alam pendukung pertanian, negara ini juga tidak bebas dari persoalan krisis pangan. Ketahanan pangan, baik di tingkat nasional, regional/daerah, maupun rumah tangga (*household*) merupakan persoalan besar yang seolah tak kunjung selesai dihadapi oleh bangsa kita. Berita tentang anak-anak yang menderita gizi buruk di berbagai penjuru tanah air seolah tak henti mengalir dari hari ke hari. Oleh sebab itu, sekalipun krisis dan ketahanan pangan ini merupakan persoalan lama atau klasik, namun ia tetap merupakan persoalan kontemporer yang upaya pemecahannya sangat mendesak untuk dilakukan.

B. Pentingnya Ketahanan Pangan

Secara biologis, pangan memang sangat penting. Pangan merupakan kebutuhan yang amat mendasar bagi setiap manusia, bahkan menentukan eksistensi manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, maka ketahanan pangan mutlak diperlukan. Namun kepentingan akan ketahanan pangan ini bukan hanya dari aspek biologis, tetapi juga aspek sosial. Kerapuhan pangan dapat menyebabkan berbagai masalah sosial, seperti keterbelakangan, ketergantungan (sehingga rentan dieksploitasi), tindakan kriminal, konflik sosial hingga tumbangny pemerintah. Dalam hal konflik sosial, sekalipun isu pangan termasuk isu "realistik" jika dilihat dari kategori Coser (Coser, 1956 dan Turner, 1998), tetapi karena ini menyangkut "perut", konfliknya bisa sangat brutal (*violent*).

Tentu saja persoalan pemenuhan kebutuhan pangan atau persoalan ketahanan pangan ini bukan merupakan persoalan yang sederhana, melainkan amat kompleks. Oleh sebab itu, upaya pemecahannya pun tidak bisa dilakukan oleh satu disiplin, melainkan multi-disiplin. Makalah ini hendak mencoba memberikan kontribusi dari aspek sosial budaya bagi upaya peningkatan ketahanan pangan di Indonesia. Tentu saja apa yang diuraikan dalam makalah yang singkat ini jauh dari komprehensif. Ini hanya merupakan beberapa pokok pikiran dan contoh-contohnya saja.

C. Pangan sebagai Konstruksi Sosial

Bagi para ilmuwan sosial yang menganut paham "konstruksionisme sosial" (*social constructionism*), berbagai "realitas" keseharian dalam hidup ini pada dasarnya merupakan hasil sebuah konstruksi secara sosial. Artinya, suatu "realitas" itu sebenarnya merupakan hasil dari proses-proses interpretasi dan relasi sosial. "Realitas" itu diciptakan (di-konstruksi) secara sosial (Berger and Luckman, 1966; Wallace and Wolf, 1999; dan Hannigan, 2006).

Pangan dan ketahanan pangan, juga merupakan sebuah konstruksi sosial (*social construct*). Tentu saja saya tidak mengingkari aspek "empiris" dari pangan dan ketahanan pangan (seperti eksistensi beras atau orang yang kekurangan makanan), tetapi dengan mengatakan bahwa pangan dan ketahanan pangan merupakan konstruksi sosial, maka seperti kata John Hannigan (2006), kita diajak untuk melihat lebih tajam "proses-proses sosial, politik dan budaya" yang turut menentukan persoalan pangan dan ketahanan pangan itu.

Bagi orang Indonesia yang kaya akan suku dan budaya, barangkali lebih mudah untuk memahami pandangan ini. Misalnya, makanan yang "enak dan sehat" bagi orang Papua barangkali tidak sama dengan makanan yang "enak dan sehat" bagi orang Jawa. Pengertian "krisis pangan" bagi orang miskin kemungkinan tidak serupa dengan pengertian "krisis pangan" bagi orang kaya. "Ketahanan pangan" bagi para konglomerat, berbeda dengan "ketahanan pangan" bagi para petani gurem. Definisi makan pun bisa berbeda antara suatu masyarakat atau komunitas dengan masyarakat atau komunitas lainnya. Sebagai contoh "makan" roti atau salad belum dianggap "makan" oleh kebanyakan orang Indonesia. Dikatakan sudah "makan"

jika yang dimakan tersebut adalah nasi. Bahwa makan, pangan dan ketahanan pangan merupakan sebuah konstruksi sosial, tentu mempunyai implikasi terhadap upaya penanganannya, seperti yang akan nampak dari uraian selanjutnya.

D. Potensi Sosial Budaya (Sosial dan Kultural Kapital) Lokal

"Ketika mengunjungi Desa Nolloth di Pulau Saparua, Maluku, beberapa tahun silam, kami disuguhi dengan *papeda*, salah satu makanan pokok di sana yang terbuat dari sagu. (Catatan: *papeda* bukan hanya khas dari segi bahan dan proses memasaknya, tetapi juga cara makannya). Sementara itu, ketika berkunjung ke NTT beberapa kali, kami disuguhi dengan *jagung bose*, juga merupakan salah satu makanan pokok di NTT. Di Trenggalek, Jawa Timur, suatu kali kami makan di rumah makan yang menyediakan makanan *tiwul*, yang terbuat dari singkong. Teman-teman orang Manado seringkali menyuguhi *bubur Manado* sebagai menu utama".

Itu hanya merupakan sekelumit kisah yang menyangkut beragam sosial budaya yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan pangan. Sebagai negara yang terdiri atas ratusan etnis atau suku dan ribuan pulau-pulau, Indonesia memang kaya akan variasi sosial budaya, termasuk yang potensial bagi upaya peningkatan ketahanan pangan.

Seperti kita ketahui bersama dari *segi konsumsi*, diversifikasi pangan merupakan suatu hal yang penting untuk menciptakan ketahanan pangan. Dalam konteks ini kita beruntung karena komunitas dan suku di berbagai daerah di Indonesia memiliki atau paling tidak pernah memiliki jenis makanan pokok yang bervariasi, bukan beras saja. Sebagai contoh, kita semua sudah mengetahui bahwa sagu merupakan salah satu makanan pokok bagi orang-orang Ambon. Sementara itu, bagi orang-orang NTT (Nusa Tenggara Timur), jagung merupakan salah satu makanan pokok yang penting, sedangkan singkong merupakan salah satu makanan pokok bagi orang Jawa dan umbi-umbian merupakan salah satu makanan pokok bagi sebagian orang di Papua.

Secara umum, masyarakat di perdesaan Indonesia mempunyai pola konsumsi yang cukup beragam. Keragaman ini bukan hanya

menyangkut makanan pokok, tetapi juga "makanan pendamping" maupun "makanan tambahan". Dengan kata lain, diversifikasi pangan justru sudah dilaksanakan oleh berbagai suku dan komunitas lokal di penjurusan negeri ini.

Pola konsumsi lokal semacam ini perlu didukung bahkan "direplikasi" di tingkat nasional untuk memperkokoh ketahanan pangan di negeri ini. Sayangnya, pada masa-masa yang lalu potensi budaya lokal semacam itu seringkali dihancurkan melalui kebijakan tertentu, seperti "berasisasi", misalnya. Sementara itu, pada masa kini budaya lokal semacam itu juga mengalami "gempuran" yang tak kalah dahsyatnya melalui konstruksi sosial tentang apa yang dianggap sebagai makanan yang "bergengsi" atau "modern". Sebuah lagu yang pernah populer, yang mengasosiasikan "Anak Singkong" sebagai anak yang serba inferior dibandingkan dengan "Anak Keju" yang melambangkan superioritas, hanyalah merupakan sebuah contoh gempuran terhadap budaya lokal yang berkaitan dengan pangan ini.

Sebenarnya pada tingkat nasional, proses diversifikasi pangan juga sudah terjadi. Kalangan kelas menengah ke atas dan juga kaum muda, khususnya di perkotaan, tidak sepenuhnya menjadikan beras sebagai satu-satunya bahan pangan pokok. Kentang, roti dan makanan lain yang terbuat dari bahan baku tepung, misalnya, sudah merupakan bahan makanan pokok yang cukup populer untuk kalangan ini. McDonald, Kentucky Fried Chicken dan Pizza memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempromosi diversifikasi pangan di kalangan kelas menengah atas serta kaum muda di perkotaan ini. Tentu proses "McDonaldisasi" ini (meminjam istilah Ritzer, 1993) sangat dipengaruhi oleh proses-proses sosiologis seperti masalah status dan prestise sosial, rasionalisasi, pragmatisme, mobilitas sosial vertikal dan sebagainya.

Dari *segi penyediaan* bahan pangan, masyarakat perdesaan juga mempunyai sistem yang lebih lentur. Ketergantungan mereka pada pasar masih relatif kurang. Berbagai kebutuhan pangan seperti beras, jagung, ubi, sayur, daging, buah-buahan dan sebagainya masih banyak yang diperoleh dengan cara mengambil dari sawah, ladang, dan kebun sendiri, atau dari hutan, danau dan sungai di sekitar mereka. Jadi masyarakat kita telah melaksanakan pola produksi dan konsumsi yang

lebih bersifat lokal seperti yang diadvokasi oleh Bill McKibben (2007) dalam bukunya *Deep Economy*.

Ternyata, pola produksi dan konsumsi komunitas lokal kita ini mempunyai daya tahan yang tinggi. Oleh sebab itu, guncangan yang mereka alami ketika terjadi krisis ekonomi maupun pangan dunia tidaklah terlalu dahsyat. Mereka mempunyai ketahanan bahkan kemandirian pangan atau *food self-sufficiency* (Trindade, 1990) yang cukup tinggi. Pola konsumsi dan produksi lokal semacam ini perlu didukung dan dikembangkan.

Dari **segi pengelolaan bahan pangan**, masyarakat lokal juga memiliki *local wisdom* yang menarik dan potensial bagi peningkatan ketahanan pangan. Pada kunjungan kami ke Kasepuhan Cipta Mulya di Desa Sinar Resmi, Kecamatan Ciselok, Pelabuhan Ratu baru-baru ini, kami menyaksikan bangunan kecil yang berjejer di depan-samping rumah sang pemimpin kasepuhan tersebut. Bangunan-bangunan kecil tersebut tidak lain adalah lumbung padi (leuit) milik masing-masing rumahtangga warga di sekitarnya.

Salah satu lumbung yang paling besar dan terletak di bagian depan merupakan lumbung yang dimiliki oleh masyarakat adat ini secara komunal. Dijelaskan bahwa warga adat kasepuhan ini memberikan lima ikat padi per kepala keluarga per tahun untuk mengisi lumbung komunal tersebut. Padi dari lumbung tersebut antara lain digunakan untuk membantu warga kasepuhan yang memerlukannya. Sistem pengelolaan pangan seperti ini merupakan sosial dan kultural kapital lokal yang sangat luhur dan penting bagi ketahanan pangan lokal dan rumahtangga.

Lumbung komunal seperti ini perlu dikembangkan di berbagai komunitas, khususnya di wilayah perdesaan, baik yang berbasis suku/adat maupun yang berbasis non-adat seperti ketetanggaan (teritorial) ataupun agama, misalnya. Di Dusun Uel, Desa Nunkurus, Kabupaten Kupang, seorang tokoh masyarakat membuat sistem lumbung desa seperti ini berbasis agama. Warga suatu gereja kecil di dusun tersebut diminta untuk mengumpulkan sejumlah padi yang disimpan sebagai antisipasi menghadapi kesulitan pangan, yang memang sering terjadi di NTT. Lumbung itu dia sebut "Lumbung Yusuf", merujuk pada cerita dalam Alkitab mengenai "kebijakan pangan" yang dibuat oleh Yusuf di Mesir, yakni mengumpulkan bahan makanan

sebagai persediaan untuk mengantisipasi masa kelaparan yang akan datang.

Masyarakat adat di negeri ini seringkali juga mempunyai nilai-nilai budaya tertentu terhadap bahan pangan yang sedikit banyak berpengaruh terhadap ketahanan pangan, khususnya pada tingkat keluarga dan komunitas lokal. Sebagai contoh, dalam "cerita rakyat" pada masyarakat Dayak Ma'anyan di Kalimantan Tengah, padi dilukiskan sebagai satu makhluk hidup yang memiliki perasaan dan kehormatan. Ia memerlukan perlakuan yang baik agar tetap betah tinggal pada suatu keluarga atau komunitas, yang diwujudkan dalam bentuk hasil panen yang melimpah. Jika mendapat perlakuan yang tidak baik atau tidak dihormati, makhluk ini akan meninggalkan keluarga atau komunitas tersebut, artinya hasil panen yang tidak baik.

Di Kasepuhan Cipta Mulya, Desa Sinar Resmi, Kecamatan Cisolok, Pelabuhan Ratu, ada nilai budaya yang melarang warganya menjual beras. Tindakan menjual beras disamakan dengan "menjual diri" atau "melacurkan diri". Nilai-nilai budaya seperti ini perlu dihormati dan didukung, bahkan dikembangkan.

Dari *segi pengelolaan sumberdaya alam* pendukung pertanian, masyarakat lokal di Indonesia juga kaya akan kebijakan (*wisdom*). Di Bali kita mengenal *subak* sebagai suatu sistem pengaturan air yang amat penting bagi proses produksi komoditi pertanian, sementara di Sumatera Barat unit sosial budaya *Nagari* juga memegang peranan penting dalam pengelolaan air untuk pertanian.

Masyarakat adat Kasepuhan Cipta Mulya di Pelabuhan Ratu mempunyai budaya luhur yang disebut *serah ponggokan*, yakni semacam "pertobatan" atas segala perbuatan yang telah dilakukan terhadap lingkungan alam. Pada masa *serah ponggokan* itu masyarakat dilarang untuk menggarap tanah selama dua atau tiga minggu bahkan bisa selama sebulan. Hak masyarakat untuk menggarap lahan diserahkan kepada Sang Pemilik melalui sesepuh adat, baru kemudian diminta kembali setelah masa "pertobatan" itu selesai. Acara ini dilakukan sekali dalam setahun.

Di Maluku kita mengenal sistem *sasi*, baik *sasi darat* maupun *sasi laut*. Selama masa tutup *sasi*, masyarakat dilarang untuk mengambil hasil bumi (*sasi darat*) ataupun hasil laut (*sasi laut*). Ada dua jenis *sasi* di

Maluku, yakni *sasi adat* dan *sasi agama (sasi gereja)*, misalnya). Keberadaan sosial dan kultural kapital dalam pengelolaan sumberdaya alam bagi pertanian ini sangat penting bagi peningkatan ketahanan pangan.

E. Faktor Pendukung Ketahanan Pangan

Potensi sosial budaya atau sosial dan kultural kapital yang telah diuraikan di atas merupakan faktor-faktor yang dapat mendukung ketahanan pangan. Selain itu, ada beberapa ciri sosial budaya bangsa kita yang juga dapat mendukung ketahanan pangan. Sebagai negara kepulauan yang maha luas dengan keberagaman suku, agama, budaya, alam dan tingkat "kemajuan"-nya, maka tidak mengherankan jika masyarakat Indonesia kaya dengan unit-unit sosial yang memiliki sifat yang disebut oleh Toennies sebagai *gemeinschaft* ("guyub"), atau yang disebut Durkheim sebagai *mechanical solidarity*.

Basis unit sosial semacam ini bermacam-macam, ada yang berbasis kesukuan, marga, agama, teritori atau daerah, pekerjaan atau profesi, almamater dan sebagainya. Dalam unit sosial ini, para anggotanya saling memperhatikan dan menolong satu sama lain, termasuk dalam masalah pangan. Oleh sebab itu, unit sosial seperti ini telah dan akan dapat memainkan peranan yang sangat penting dalam menciptakan ketahanan pangan, baik di tingkat rumahtangga maupun komunitas yang lebih luas.

F. Faktor Penghambat Ketahanan Pangan

Faktor sosial budaya di Indonesia ada juga yang dapat menghambat upaya menciptakan ketahanan pangan yang kokoh. Dari *segi konsumsi*, makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia masih berupa nasi. Seperti telah disinggung sebelumnya, bagi banyak orang Indonesia, sebelum makan nasi masih belum dianggap makan.

Tokoh masyarakat di Desa Sinar Resmi di Pelabuhan Ratu, misalnya, mengatakan bahwa makan buras sekalipun bagi masyarakat di desa tersebut masih dianggap sebagai "camilan" saja, belum "makan". Ketergantungan pada satu jenis makanan pokok, yakni beras, semacam ini membuat ketahanan pangan kita relatif rapuh (*vulnerable*), apalagi produksi padi dalam negeri kita seringkali tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi domestik. Akibatnya, ketika terjadi

kenaikan harga komoditi beras di dunia seperti yang sempat terjadi belakangan ini, maka ketahanan pangan kita pun ikut terancam.

Selanjutnya, ada pandangan bahwa nasi melambangkan status sosial yang lebih tinggi dari makanan lainnya seperti jagung atau ubi, misalnya. Ketika kami mengunjungi beberapa desa di NTT, dijelaskan bahwa mereka biasanya menyuguhkan makanan nasi kepada tamu untuk menghormati tamu tersebut. Mereka enggan menghadirkan masakan jagung untuk tamu, karena dianggap nilai atau *prestise*-nya lebih rendah. Memang mereka juga menghadirkan masakan jagung, tapi itu lebih sebagai "pelengkap" saja, terutama untuk tamu yang dianggap dapat menerima makanan "rakyat kelas bawah" tersebut. Konstruksi sosial yang menempatkan beras lebih tinggi gengsi atau *prestise*-nya seperti ini turut mendorong proses "berasiasi" dan ketergantungan pada beras yang sangat tinggi, yang pada gilirannya melemahkan ketahanan pangan kita.

Sejajar dengan itu, di kalangan kelas menengah ke atas juga terdapat konstruksi sosial yang memandang beberapa jenis pangan domestik kurang bergengsi dibandingkan bahan pangan impor. Saya teringat pengalaman kami dengan seorang teman untuk membuat selai dari durian dan gula aren beberapa tahun yang lalu. Setelah dilakukan uji coba beberapa kali, selai durian tersebut dikemas dalam botol dengan label yang sangat baik dan mengikuti standar pengolahan yang baik dan benar pula (Salah seorang dari kami adalah lulusan S-2 dibidang *food science* dari Kanada dan calon PhD dibidang *food science* dari UNSW, Sydney, Australia).

Ketika produk ini dibawa ke sebuah "toko" terkemuka di Jakarta, mula-mula petugasnya senang melihatnya. Namun ketika dia mengetahui bahwa produk ini kami buat sendiri (*home industry*), maka ia pun menolak untuk memasarkannya. Kalau saja ini produk luar negeri (impor), dia bersedia memasarkannya. Konstruksi sosial seperti ini tentunya kurang mendukung pengembangan ketahanan pangan domestik.

Berkaitan dengan konsumsi ini, akses terhadap pangan juga dipengaruhi oleh berbagai aspek sosial, politik dan budaya. Salah satunya adalah melalui "variabel antara" yakni kemiskinan. Kita tahu bahwa kemiskinan antara lain disebabkan oleh faktor struktural (sosial) dan kultural. Stratifikasi sosial, kebijakan pemerintah dan internasional

serta krisis global, merupakan contoh faktor struktural yang dapat menyebabkan kemiskinan. Sementara itu, nilai-nilai budaya serta adat istiadat tertentu, termasuk upacara kematian yang berlangsung berminggu-minggu dan menelan biaya besar, merupakan contoh faktor kultural yang dapat menyebabkan kemiskinan. Demikian juga dengan etos kerja (Weber, 1930/1992, misalnya).

Padahal, kemiskinan itu sendiri sangat menentukan akses terhadap pangan, yang pada gilirannya menentukan tingkat ketahanan pangan. Dengan demikian, maka tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia dewasa ini mengindikasikan adanya faktor sosial, politik dan budaya yang menghambat terciptanya ketahanan pangan yang tangguh, khususnya bagi sebagian dari kelompok miskin tersebut.

Dari *segi produksi*, salah satu ancaman yang amat besar dan serius terhadap ketahanan pangan, khususnya beras adalah proses konversi lahan pertanian subur, khususnya di Jawa yang terus berlangsung. Konversi lahan pertanian ini sesungguhnya hanyalah bagian permukaan dari fenomena sosial budaya yang kompleks yang berada di belakangnya. Di sana ada masalah kepentingan (*interest*) dari berbagai kelompok serta kontestasi kekuasaan antara kelas "kapitalis besar", penguasa, dan petani. Dalam relasi kekuasaan itu kita berjumpa antara lain dengan masalah marginalisasi pertanian dan kaum tani melalui sikap dan kebijakan pemerintah, baik disadari ataupun tidak. Kebijakan tentang pupuk, reforma agraria, serta masalah irigasi merupakan contoh mutakhir dalam konteks ini.

Pemerintah nampaknya belum "habis-habisan" mendukung dan memperkuat sektor pertanian di Indonesia, bahkan cenderung mengabaikannya. Sekalipun Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mencanangkan program "revitalisasi pertanian" pada tahun 2005 (Krisnamurthi 2006), tapi realisasi dari program itu sangat minim, sehingga lebih berupa retorika belaka. Oleh sebab itu, meminjam istilah Prof. Tjondronegoro, kita menjadi "Negara Agraris Ingkari Agraria" (Tjondronegoro, 2008). "Pengabaian" sektor pertanian oleh pemerintah merupakan faktor sosial yang sangat memperlemah ketahanan pangan nasional.

Sementara itu, kontestasi kepentingan dan kekuasaan antara kelas kapitalis dengan kaum tani antara lain dapat kita amati pada kasus kelangkaan pupuk yang telah terjadi berulang kali dan yang belakangan

ini membuat para petani di Jawa Timur marah (Kompas, 20/11/08 hal 22). Menarik untuk menyimak pernyataan Direktur Keuangan PT. Pupuk Kujang menyangkut kegiatan operasi pasar (OP) pupuk di tengah-tengah kelangkaan pupuk dan kepanikan petani baru-baru ini. Dijelaskan "tanpa ada permintaan, OP tidak bisa dijalankan. Nanti kami yang disalahkan pemegang saham" (Kompas, 29/11/08 hal 17). Jadi, masalah kelangkaan pupuk itu bukan persoalan teknis melainkan persoalan sosial.

Selanjutnya, di belakang konversi lahan itu ada pula persoalan nilai-nilai budaya, khususnya gelombang materialisme, konsumerisme dan pragmatisme yang melanda masyarakat hingga ke pelosok tanah air. Perpaduan kekuatan gelombang materialisme, konsumerisme dan pragmatisme dengan "kekuasaan" (*power*) pengusaha dan penguasa, memudahkan para petani menjual lahan mereka. Ada lagi masalah konstruksi sosial yang memandang bahwa usaha pertanian itu identik dengan keterbelakangan dan kemiskinan.

Itu sebabnya cukup banyak generasi muda yang tidak lagi tertarik untuk melanjutkan usaha pertanian orang tuanya. Memang, kenyataannya nilai tukar petani tanaman pangan (NTPP) masih rendah. Pada bulan Oktober lalu, misalnya, NTPP hanya 97,64 (BPS, 2008). Sementara itu, data menunjukkan bahwa pada tahun 2003, misalnya, 82,7% rumah tangga pertanian dikategorikan sebagai miskin (Krisnamurthi, 2006). Jadi, seperti kata Krisnamurthi "sebagian besar petani adalah miskin dan sebagian besar orang miskin adalah petani". "Realitas sosial" ini turut mendorong proses konversi lahan pertanian tentunya.

Di sisi yang lain, terjadi pula "guremisasi" petani kita. Sebagai contoh, hasil Sensus Pertanian menunjukkan bahwa pada tahun 1993 jumlah petani gurem, yakni petani yang menguasai lahan kurang dari 0,5 ha, adalah 10,8 juta (52,1%), sedangkan pada tahun 2003 jumlah tersebut naik menjadi 13,7 juta rumah tangga (56,2%) (BPS, 2004). Akibat dari "guremisasi" ini adalah terjadinya fenomena sosial yang disebut oleh Geertz (1963) sebagai berbagi kemiskinan atau "pemerataan kemiskinan". Fenomena sosial budaya ini cenderung memperlemah ketahanan pangan, baik di tingkat rumah tangga maupun di tingkat nasional. "Guremisasi" petani juga merupakan hasil dari berbagai fenomena sosial budaya yang ada di belakangnya, termasuk pola

pewarisan maupun faktor sosial budaya yang mendorong terjadinya penjualan serta konversi lahan seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Sebenarnya masih banyak persoalan sosial budaya lainnya yang menyangkut masalah produksi ini, seperti adopsi inovasi (teknologi maupun manajemen usahatani), orientasi produksi, etos kerja, relasi patron-klien, kemiskinan dan sebagainya. Namun dalam makalah ini, hal-hal tersebut tidak sempat dibahas.

G. Penutup

Dalam makalah singkat ini ditunjukkan bahwa pangan dan ketahanan pangan merupakan sebuah konstruksi sosial. Oleh sebab itu, maka ada beberapa konstruksi sosial tentang pangan (dan karenanya ketahanan pangan) yang perlu di-dekonstruksi, baru kemudian di-rekonstruksi agar tercipta ketahanan pangan yang lebih kokoh.

Indonesia memiliki kekayaan sosial dan budaya yang dapat mendukung dan memperkokoh ketahanan pangan. Namun di lain pihak, kita juga memiliki ciri-ciri sosial budaya yang dapat menghambat upaya menciptakan ketahanan pangan yang kuat. Faktor sosial budaya yang mendukung dan menghambat ini perlu diperhatikan dalam melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi sosial bagi upaya mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh. Catatan penting, kita perlu melakukan tindakan yang konkrit, bukan hanya sekedar berwacana atau menebar retorika saja!

H. Daftar Pustaka

- Bakker, J.I. Hans, 1990. Introduction. Food Production, Distribution and Exchange: Conceptualizing Food Security and Insecurity in Comparative International and Multidisciplinary Perspective dalam J.I. Hans Bakker (Ed), 1990. The World Food Crisis: Food Security in Comparative Perspective. Canadian Scholars' Press Inc., Toronto, Ontario, Canada.
- Berger, Peter L. and Thomas Luckman, 1966. The Social Construction of Reality. Doubleday, New York.

- BPS, 2004. Berita Resmi Statistik No. 14/VII/16 Februari 2004. Sebaran Rumahtangga Pertanian dan Rumahtangga Petani Gurem Menurut Provinsi di Indonesia.
- _____, 2008. Berita Resmi Statistik No. 62/12/Th.XI, 1 Desember 2008. Perkembangan Nilai Tukar Petani, Harga Produsen Gabah dan Upah Buruh.
- Charon, Joel M., 2001. *Ten Questions. A Sociological Perspective (Forth Edition)*. Wadsworth. Australia, Canada, Mexico, Singapore, Spain, United Kingdom, United States.
- Coser, Lewis A., 1956. *The Functions of Social Conflict*. Free Press, London.
- Geertz, Clifford, 1963. *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia*. University of California Press, Berkeley, California.
- Hannigan, John, 2006. *Environmental Sociology (second Edition)*. Routledge, London and New York.
- Hariyadi, Purwiyatno dkk (Editor), 2006. *Konstruksi Kelembagaan Sosial Penanganan dan Pencegahan Rawan Pangan dan Gizi Buruk*. Prosiding Lokakarya Nasional II Penganekaragaman Pangan. Forum Kerja Penganekaragaman Pangan.
- Krisnamurthi, Bayu, 2006. *Revitalisasi Pertanian. Sebuah Konsekwensi Sejarah dan Tuntutan Masa Depan dalam Jusuf Susanto dan Tim Penyunting Teks dan Indeks: Tim Redaksi Buku Kompas (Editor)*, 2006. *Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Kompas, 20 November 2008 halaman 22. Pupuk Langka. Petani Hadang Truk Pengangkut Pupuk.
- _____, 29 November 2008 halaman 17. Operasi Pasar Tersendat. Dinas Pertanian Belum Ajukan Permintaan OP Pupuk Urea Bersubsidi.

- McKibben, Bill, 2007. *Deep Economy*. Times Books, Henry Holt and Company, New York.
- Lawang, Robert M.Z., 2005. *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologi. Suatu Pengantar*. FISIP UI Press, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok.
- Ritzer, George, 1993. *The McDonalization of Society*. Pine Forge Press. Thousand Oaks, London, New Delhi.
- Tjondronegoro, Sediono M.P., 2008. *Negara Agraris Ingkari Agraria: Pembangunan Desa dan Kemiskinan di Indonesia*. Disunting oleh Fauzan Djamil dan Sofwan Samandawai. AKATIGA, Bandung.
- Trindade, Sergio C., 1990. *The Effect of Science and Technology on the Process of Development dalam J. I. Hans Bakker (Ed), 1990. The World Food Crisis: Food Security in Comparative Perspective*. Canadian Scholars' Press Inc., Toronto, Ontario, Canada.
- Turner, Jonathan H., 1998. *The Structure of Sociological Theory (Sixth Edition)*. Wadsworth Publishing Company.
- Wallace, Ruth A. and Alison Wolf, 1999. *Contemporary Sociological Theory. Expanding the Classical Tradition (Fifth Edition)*. Prentice Hall, New Jersey.
- Weber, Max, 1930/1992. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Routledge, London and New York.